

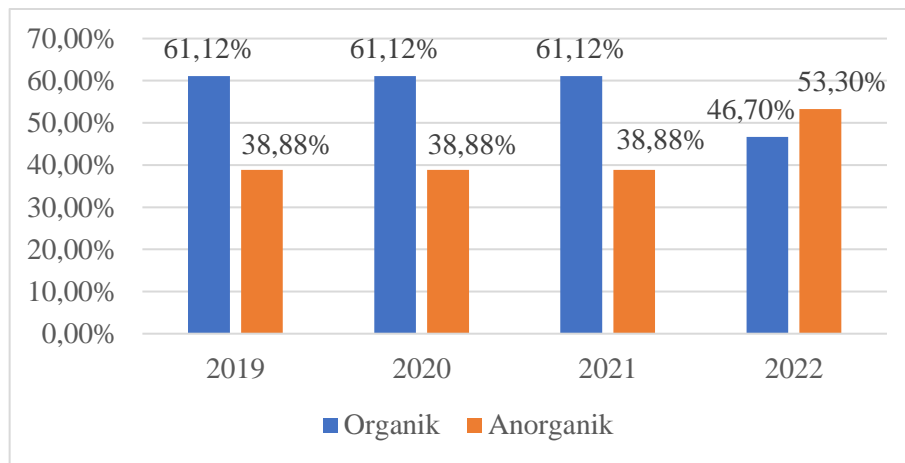
## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan kompleks di Indonesia khususnya di daerah perkotaan, seperti data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwasannya pada tahun 2019 Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah, 60% diantaranya ditimbun di tempat pembuangan akhir, 10% sampah di daur ulang dan 30% lainnya tidak terkelola sehingga mencemari lingkungan sekitar (Sumartiningtyas, 2020). Sedangkan pada tahun 2020 *Indonesia National Plastic Action Partnership* merilis laporan bahwa terdapat 67,2 juta ton sampah yang dihasilkan Indonesia dalam kurun waktu satu tahun dan 620 ribu ton diantaranya mencemari area perairan. Sampah tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga yaitu sebesar 60% hingga 75% (Pranita & Putri, 2021). Permasalahan pengelolaan sampah diperkotaan ini diperparah dengan terbatasnya lahan yang menjadi tempat pembuangan akhir (TPA) dan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah, seperti yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kota Yogyakarta (Ethika & Lestiani, 2024).

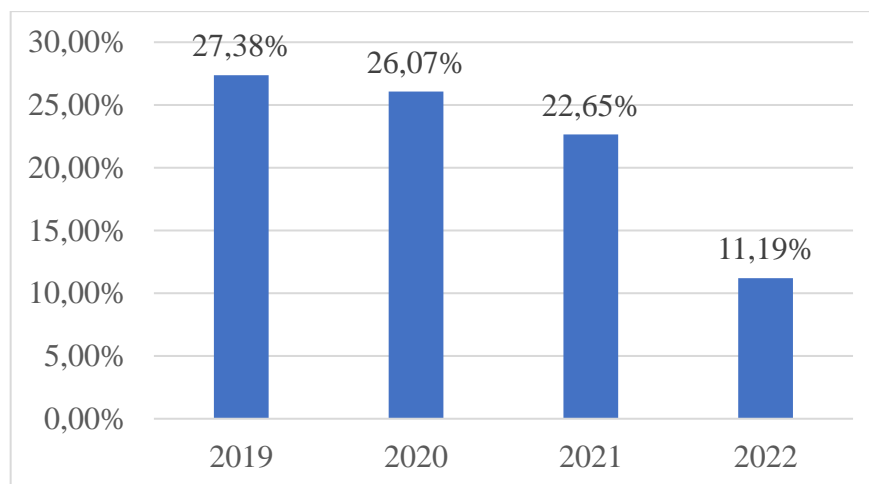
Kota Yogyakarta menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang sampah terbanyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah rata-rata timbulan sampah perharinya sebesar 303,13 ton pada tahun 2022. Sumber sampah terbesar di Kota Yogyakarta berasal dari sektor rumah tangga yaitu 193,25 ton perhari (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah (SIPSN), 2022).

Namun ternyata volume sampah anorganik di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan pada tahun 2022 sekitar 20% dari tahun sebelumnya menjadi 53,30% seperti pada gambar 1. Keadaan ini diperparah dengan adanya penurunan tingkat pengurangan sampah, dimana pada tahun 2021 tingkat pengurangan sampah sebesar 22,65% dan menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 11,19% seperti pada gambar 2.



Gambar 1. Komposisi Sampah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah (SIPSN), 2023



Gambar 2. Tingkat Pengurangan Sampah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023

Puncak permasalahan sampah di Kota Yogyakarta yang menjadi perhatian publik yaitu penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang sering terjadi sejak tahun 2022. Pada Maret 2022, TPA Piyungan sempat ditutup tiga hari karena adanya perbaikan jalan dan mengakibatkan sampah menumpuk diberbagai depo sampah atau tempat pembuangan sementara hingga mencapai 900 ton (Tim detikJateng, 2022). Kemudian selang dua bulan TPA Piyungan kembali ditutup karena masyarakat sekitar memblokir akses jalan menuju TPA sebagai aksi protes adanya kenaikan volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan (Ariefana, 2022). Aksi tersebut juga dipicu karena semakin parahnya pencemaran lingkungan disekitar TPA Piyungan dan pemerintah kurang memperhatikan hal tersebut (Pertana, 2022). Tidak hanya sampai disitu, TPA Piyungan kembali ditutup pada Bulan Desember tahun 2022 karena kondisi TPA Piyungan yang *overload* dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar (P. Setyaningrum, 2023).

Penutupan TPA Piyungan kembali terjadi pada tahun 2023 tepatnya tanggal 23 Juli hingga 5 September semakin memperkuat pernyataan Yogyakarta darurat sampah (Pangaribowo & Rusiana, 2023). Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya tumpukan sampah dipinggir jalan protokol hingga Alun-Alun Kota Yogyakarta (Mustaqim, 2023). Selain itu, DLH Kota Yogyakarta mencatat terdapat peningkatan volume sampah yang dibuang ke sungai seperti Sungai Code, Sungai Gajahwong dan Sungai Winongo (Karin, 2023). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta bersama TNI AL melakukan bersih sampah di Sungai Code dan menemukan 4 ton sampah

diantaranya 2,7 ton sampah residu, 40 kg sampah anorganik dan 1 ton sampah organik (Rinepta, 2023).



Gambar 3. Penumpukan sampah di bahu jalan Kota Yogyakarta

Sumber: <https://jogja.tribunnews.com/2023/07/24/foto-foto-dampak-penutupan-tpa-piyungan-atau-tpst-piyungan>

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengatur terkait pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Perda tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha bertanggungjawab untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari dan harus dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir. Lebih lanjut, Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun kebijakan, strategi, target, dan program pengurangan serta penanggulangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2018. Salah satu strateginya yaitu dengan membentuk bank sampah. Urgensi pembentukan bank sampah ini yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah pola perilaku masyarakat sehingga dapat meminimalisir timbulan sampah (Cakyono, 2023). Namun dalam pengimplementasian program bank sampah sangat diperlukan

adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Wardani, 2023).

Saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DLH Kota Yogyakarta telah membentuk Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta, menugaskan fasilitator kelurahan (faskel), dan mewajibkan setiap wilayah RW di Kota Yogyakarta memiliki satu bank sampah unit. Harapannya masyarakat dapat memilah sampah berdasarkan jenisnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik, yang kemudian sampah anorganik dapat dibawa ke bank sampah (Ramadhan, 2022). Salah satu wilayah yang telah menerapkan program bank sampah yaitu Kelurahan Tegalpanggung yang pada tahun 2023 tercatat telah memiliki 16 bank sampah unit yang tersebar dimasing-masing wilayah RW. Namun ternyata faktanya tidak semua bank sampah unit di wilayah Kelurahan Tegalpanggung aktif melakukan kegiatan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika kolaborasi dalam pengelolaan sampah anorganik berbasis masyarakat di Kelurahan Tegalpanggung. Penelitian ini menggunakan teori dinamika kolaborasi menurut Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh (2012) untuk menelaah dinamika didalamnya. Penelitian ini juga berkontribusi untuk menambah literatur terkait kajian bank sampah dari perspektif *collaborative governance*. Maka peneliti memilih judul penelitian, “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Anorganik Berbasis Masyarakat: Studi Manajemen Bank Sampah di Kelurahan Tegalpanggung Tahun 2022-2023”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan sampah di Kota Yogyakarta khususnya di Kelurahan Tegalpanggung yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana dinamika kolaborasi dalam pengelolaan sampah anorganik berbasis masyarakat di Kelurahan Tegalpanggung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dinamika kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan sampah anorganik berbasis masyarakat di Kelurahan Tegalpanggung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai sarana pengembangan studi terkait dinamika kolaborasi dalam pengelolaan sampah anorganik berbasis masyarakat melalui bank sampah di Kelurahan Tegalpanggung.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah anorganik di Kota Yogyakarta.

b. Bagi Bank Sampah

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bank sampah di Kelurahan Tegalpanggung sebagai sarana membantu masyarakat dalam mengelola sampah anorganik.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait pentingnya pengelolaan sampah khususnya sampah anorganik melalui bank sampah sehingga dapat mengurangi timbulan sampah di TPS setempat.

## 1.5 Literature Review

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Tahun	Isi
1.	Partisipasi Publik dalam <i>Collaborative governance</i> pada Program Sister City Bandung dan Jepang dalam Menanggulangi Sampah di Kota Bandung	Thomas Bustomi, Andre Ariesmansyah, dan Asep Kusdiman (Bustomi et al., 2022)	2022	Partisipasi publik sangat diperlukan dalam proses pembuatan keputusan hingga pengimplentasian keputusan yang dalam hal ini terkait penanggulangan sampah di Kota

				Bandung. Faktor yang mempengaruhi partisipasi publik dalam pengelolaan sampah antara lain yaitu faktor internal berupa pendidikan, pendapatan, pengetahuan tentang sampah dan kepedulian terhadap sampah
2.	Pengelolaan Sampah Berbasis <i>Collaborative governance</i> di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara	Djogeh Harmana, Ella L. Wargadinata, dan Ismail Nurdin (Harmana et al., 2021)	2021	<i>Collaborative governance</i> yang terjalin dalam pengelolaan sampah di Kota Tarakan belum berjalan optimal dikarenakan tidak adanya partisipasi masyarakat dan hanya terjalin



				antara pemerintah dengan pihak swasta.
3.	Praktik <i>Collaborative governance</i> dalam Pengelolaan Sampah	Devita Rizqi Hidayanti dan David Efendi (Hidayanti & Efendi, 2020)	2021	Penerapan teori <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah di TPA Piyungan belum efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat tiga komponen yang belum terpenuhi yaitu komitmen terhadap tujuan, penyebaran informasi dan SDM.
4.	Proses <i>Collaborative governance</i> dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis	Teddy Rusmawan, Denok Kurniasih, dan	2022	<i>Collaborative governance</i> yang terjalin dalam inovasi pengelolaan sampah di

	Digital (Studi di Kabupaten Banyumas)	Paulus Israwan Setyoko (Rusmawan et al., 2022)		Kabupaten Banyumas sudah berjalan efektif. <i>Stakeholder</i> yang terlibat antara lain pemerintah, swasta (PT Banyumas Investama, kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan masyarakat umum. Keberhasilan tersebut ditandai dengan adanya peluang usaha dari hasil pemanfaatan sampah organik dan anorganik.
5.	Kewajiban Masyarakat dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup	Elly Kristiani Purwendah, Rusito, dan Aniek Periani	2022	Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting selain dari aspek

	Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	(Purwendah et al., 2022)		kelembagaan, pembiayaan, peraturan dan teknik operasional. Salah satu implementasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu dengan pembentukan bank sampah yang diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibuang di TPA.
6.	Karakteristik Peningkatan pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat Melalui Bank Sampah	Ike Setyaningrum (I. Setyaningrum, 2015)	2015	Faktor partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tandang antara lain usia, pendidikan,

				pendapatan, dan pengetahuan, Namun dalam hal ini dengan adanya bank sampah telah terbukti bahwa sampah yang dibuang ke TPS berkurang.
7.	Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim: Suatu Telaah Sistematis	Anti Ahsanati, Achmad Husen, dan Samadi (Ahsanati et al., 2022)	2022	Pengelolaan sampah di perkotaan akan lebih komprehensif dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan masyarakat sebagai subjek keberhasilan pengelolaan sampah sehingga dapat menjadi katalisator

				tercapainya tujuan pengurangan timbulan sampah di TPA.
8.	Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya	Donna Asteria dan Heru Heruman (Asteria & Heruman, 2016)	2016	Keberadaan bank sampah sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan membentuk kesadaran, kemampuan dan kemandirian masyarakat.
9.	<i>Collaborative governance</i> dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang	Tyas Ayu Puspita dan Calvin Edo Wahyudi (Puspita & Wahyudi, 2023)	2023	Pengelolaan sampah dengan teori <i>collaborative governance</i> di Kabupaten Jombang dinilai berhasil yang

				ditandai dengan setiap aktor yang terlibat telah melaksanakan perannya. Selain itu juga telah dibuat policy brief dengan menggandeng lima aktor sehingga diharapkan kolaborasi ini akan berlangsung dalam jangka panjang.
10.	Studi Komparasi Pengurangan Timbulan Sampah Berbasis Masyarakat Menggunakan Prinsip Bank Sampah di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo	Maulinna Kusumo Wardhani dan Arisandi Dwi Harto (Wardhani & Harto, 2018)	2018	Bank sampah merupakan salah satu solusi dalam pengelolaan sampah dengan mengajak dan meningkatkan kepedulian masyarakat. Hal ini ditunjukkan bahwa di Kota Surabaya

				telah berhasil mengurangi volume sampah yaitu sebesar 81,50% namun di Kabupaten Sidoarjo hanya sebesar 6,14% dan Kabupaten Gresik 2,40%.
--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian diatas bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat sudah sejak lama diimplementasikan namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya terfokus pada efektifitas proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sedangkan penelitian saat ini akan mengkaji terkait dinamika kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan sampah anorganik berbasis masyarakat di Kelurahan Tegalpanggung.

## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 Collaborative Governance

Kolaborasi yaitu suatu kegiatan pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yang dimaksud disini adalah para aktor-aktor yang memiliki kepentingan. Model ini mengharuskan para aktor untuk berdiskusi dan mengutarakan kepentingannya (Innes & Booher, 2007).

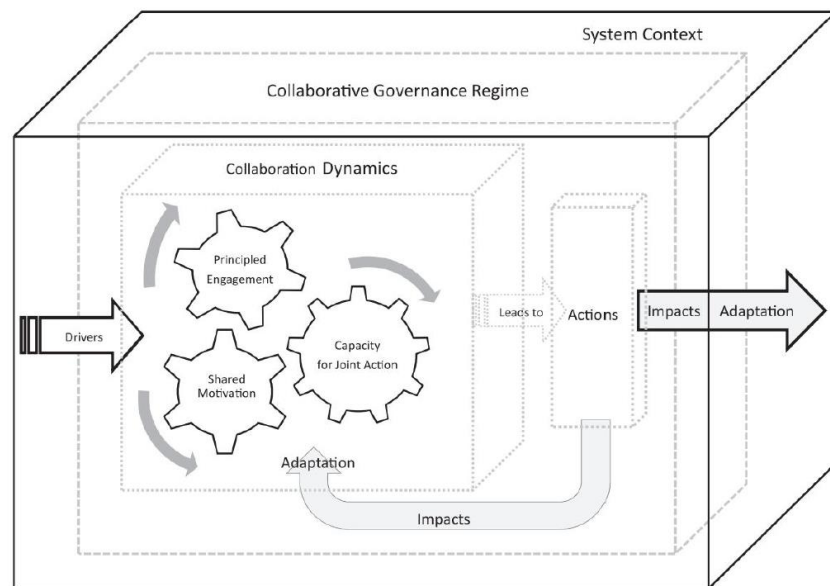
Menurut Ansell & Gash (2008) *collaborative governance* yaitu proses pengelolaan pemerintahan yang melibatkan aktor pemilik kepentingan secara langsung sehingga dalam pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara bermusyawarah yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan publik. *Collaborative governance* ini berfokus pada permasalahan publik sehingga diharapkan mampu menghasilkan kebijakan publik yang dapat diimplementasikan dan dijalankan oleh berbagai pihak. Tujuan dari adanya kolaborasi antar *stakeholders* yaitu mencapai kesepakatan bersama dan dapat mewujudkan keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik (Astuti et al., 2020).

Adanya konsep *collaborative governance* ini menggambarkan bahwa suatu organisasi terkadang tidak dapat memecahkan suatu permasalahan sendiri dan harus melibatkan pihak lain untuk ikut andil dalam penyelesaian permasalahan tersebut (O'Leary et al., 2006). Selain itu, adanya kolaborasi bertujuan untuk meningkatkan "*public value*" dengan bekerjasama antar instansi daripada bekerja sendiri (Bardach, 2001). Dalam proses kolaborasi tidak hanya melibatkan pemerintah dan non-pemerintah namun juga melibatkan aktor lain seperti swasta, komunitas, dan masyarakat yang nantinya akan tercipta "*multi partner governance*" (Subarsono, 2005).

Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh (2012) menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah sebuah proses dalam manajemen dan perumusan kebijakan dengan melibatkan aktor-aktor pemilik kepentingan dari berbagai level mulai dari pemerintah,



swasta, hingga masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yaitu untuk melihat kolaborasi dari berbagai sisi dan berbagai aspek sehingga dapat menjelaskan faktor pendorong, proses keterlibatan setiap aktor, motivasi, dan kapasitas setiap aktor yang terlibat sehingga dapat mengambil keputusan bersama (Emerson et al., 2012). Dalam teori Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh (2012) disebut *Collaborative Governance Regime (CGR)* karna dalam teorinya dijelaskan secara rinci proses kolaborasi yang dinamis dan bersiklus sehingga menciptakan dinamika kolaborasi yang berdampak pada hasil kolaborasi.



Gambar 4. Kerangka Integratif *Collaborative Governance*

Sumber: Emerson et al., (2012)

Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh (2012) menjelaskan bahwa terdapat tiga variabel dalam dinamika kolaborasi yaitu:

1. *Principled Engagement* (Keterlibatan yang berprinsip)

Dalam kolaborasi setiap aktor memiliki kepentingan memiliki karakteristik yang akan menjadi kunci keberhasilan prinsip bersama, sehingga pemilihan aktor yang terlibat kolaborasi sangat penting. Dalam proses ini terdapat empat tahapan yaitu *discovery* (pengungkapan), *defeniation* (definisi), *deliberation* (deliberasi), dan *determination* (penentuan).

2. *Share Motivation* (Motivasi bersama)

Setelah menentukan prinsip bersama untuk menjalankan kolaborasi, motivasi bersama menjadi indikator awal berjalannya dinamika kolaborasi. Motivasi bersama harus selalu berjalan seiring berjalannya proses kolaborasi. Adanya motivasi bersama ini akan memperkuat solidaritas untuk saling menguatkan dalam mencapai tujuan bersama. Terdapat empat elemen untuk menciptakan motivasi bersama yaitu *commitment* (komitmen), *trust* (kepercayaan), *mutual understanding* (pemahaman bersama), dan *legitimacy internal* (pengakuan internal).

3. *Capacity for Join Action* (Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama)

*Collaborative governance* selain bertujuan untuk mencapai tujuan bersama juga bertujuan untuk mengembangkan kapasitas setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Terdapat empat elemen yaitu kelembagaan, kepemimpinan, sumber daya, dan pengetahuan.

### 1.6.2 Manajemen Pengelolaan Sampah

Teori pengelolaan sampah mencakup berbagai kerangka kerja dan praktik yang bertujuan untuk mengatasi tantangan pembuangan sampah dan pemulihan sumber daya, sehingga mengintegrasikan dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk mencapai keberlanjutan. Dalam penelitian Nguyen et al., (2023) mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah dan keterlibatan masyarakat secara signifikan sangat mempengaruhi praktik berkelanjutan. Selain itu, dalam penelitian Miković & Kekez (2024) juga menyebutkan bahwa dengan adanya kolaborasi antara para pemangku kepentingan dan partisipasi warga yang aktif dapat mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kemudian pada penelitian Lagman-Bautista (2020) mengemukakan bahwasannya kerangka teoritis yang komprehensif untuk pengelolaan sampah yaitu dengan menggabungkan ekologi perkotaan, pembuatan kebijakan, dan inovasi lingkungan. Dengan begitu, kerangka kerja tersebut akan mengubah kota menjadi lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam manajemen pengelolaan sampah terdapat kerangka kerja 7R yang menekankan pada prinsip-prinsip *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), *Recycle* (mendaur ulang), *Recover* (memulihkan), *Redesign* (mendesain ulang), *Remanufacture* (memproduksi kembali), dan *Rethink* (memikirkan kembali).

Pendekatan holistik ini bertujuan untuk meminimalisir sampah dan meningkatkan efisiensi sumber daya di berbagai sektor.



Gambar 5. Framework 7R

Sumber: Beyond Recycling Basics: 7 R's of Waste Reduction

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sejati (2009) menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan untuk menangani sampah yang secara garis besar kegiatan tersebut meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Menurut Habibah (2021) sampah dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga.

- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari aktivitas industri dan fasilitas publik.
- c. Sampah spesifik yaitu sampah selain sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga dimana sampah tersebut mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 juga dijelaskan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, kearifan lokal, ecoregion, partisipatif, dan nilai ekonomi. Selain itu juga disebutkan tujuan dari diselenggarakannya pengelolaan sampah yaitu:

- a. Membudayakan kebersihan dan keindahan diseluruh Kota Yogyakarta
- b. Meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan
- c. Menjadikan sampah sebagai sumber daya
- d. Memberikan nilai tambah untuk kegiatan ekonomi produktif, kreatif, dan mandiri berorientasi pasar
- e. Memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan sampah mandiri
- f. Memberikan daya tarik wisata di daerah
- g. Mengurangi kuantitas sampah dan dampak yang diberikan oleh sampah

Lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 3 menjelaskan bahwa pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat dilakukan melalui:

- a. Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- b. Pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- c. Pendaur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

### **1.6.3 Bank Sampah**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah mendefinisikan bahwa bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) sebagai sarana edukasi dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha dan/atau pemerintah daerah. Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah pasal 1 ayat 2 mendefinisikan bahwa bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Shentika (2016) menjelaskan bahwa bank sampah adalah suatu lembaga ekonomi yang menggunakan sampah sebagai alat transaksinya. Secara sederhana

Aryenti (2011) menjelaskan bahwa bank sampah merupakan tempat menabung sampah yang telah dipilah berdasarkan jenisnya.

Konsep bank sampah dengan pendekatan pengelolaan sampah 3R memberikan pandangan baru terhadap masyarakat bahwa sampah memiliki nilai tambah jika tepat pengelolaannya (Suryani, 2014). Mekanisme kerja bank sampah dijelaskan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 pada pasal 5 yang meliputi pemilahan sampah, penyerahan sampah ke bank sampah, penimbangan bank sampah, pencatatan, hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan dan bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana. Ariefahnoor et al., (2020) menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen atau standar berdirinya sebuah bank sampah yaitu:

- a. Penabung sampah atau dapat disebut nasabah yaitu masyarakat yang melakukan pemilahan sampah kemudian ditabung melalui bank sampah serta memiliki buku tabungan.
- b. Pelaksana atau pengurus bank sampah yaitu masyarakat yang terpilih sebagai pengelola bank sampah yang bekerja secara sukarela maupun profesional. Pengurus bank sampah setidaknya terdiri dari tiga orang yaitu direktur, bendahara, *customer service*.
- c. Pengepul sampah yaitu pembeli sampah yang kemudian untuk didaur ulang sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan secara menyeluruh.

Hal diatas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah perlu menerapkan konsep *collaborative governance* karena permasalahan sampah merupakan kepentingan dan tanggung jawab seluruh elemen mulai dari pemerintah, swasta hingga masyarakat. Dengan menggunakan konsep *collaborative governance* maka permasalahan yang terjadi akan menjadi permasalahan bersama sehingga tercipta solusi yang tepat dengan peran masing-masing *stakeholder* (Safitri et al., 2021). Konsep *collaborative governance* dalam bank sampah melibatkan tiga *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pihak pemerintah yang terlibat yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pemerintah kelurahan, pihak swasta yang terlibat yaitu pengepul yang telah bekerjasama dengan unit bank sampah, dan masyarakat yang terlibat merupakan pengurus unit bank sampah.

## **1.7 Definisi Konseptual**

### ***1.7.1 Collaborative Governance***

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai penjelasan *collaborative governance* dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan proses pencarian alternatif solusi permasalahan publik dengan melibatkan aktor-aktor yang memiliki kepentingan melalui musyawarah sehingga tercapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan publik.



### 1.7.2 Manajemen Pengelolaan Sampah

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah proses menangani timbulan sampah dengan melakukan pengurangan dan penanganan sampah yang menerapkan konsep 7R (*reduce, reuse, dan recycle*).

### 1.7.3 Bank Sampah

Bank sampah adalah sebuah organisasi yang memfasilitasi pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse dan recycle*) yang dikelola oleh masyarakat yang bertujuan mengedukasi masyarakat bahwa sampah yang terkelola dengan baik memiliki nilai ekonomi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

## 1.8 Definisi Operasional

Penelitian ini disajikan dalam bentuk beberapa indikator mengenai dinamika *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah anorganik berbasis masyarakat melalui bank sampah. Kerangka operasional sebagai berikut:

Tabel 2. Kerangka Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Dinamika Kolaborasi	<i>Principled</i> <i>Engagement</i>	1. Identifikasi latar belakang

		(Keterlibatan yang berprinsip)	<p>terbentuknya bank sampah.</p> <p>2. Identifikasi peluang adanya bank sampah.</p> <p>3. Identifikasi agenda sosialisasi dan pelatihan serta jadwal bank sampah.</p>
		<i>Share Motivation</i> (Motivasi bersama)	<p>1. Adanya kepercayaan antar <i>stakeholder</i>.</p> <p>2. Adanya pemahaman yang sama terkait pentingnya mengelola sampah anorganik melalui bank sampah.</p> <p>3. Terdapat SK yang menunjukkan adanya pengakuan internal.</p>

			4. Adanya komitmen yang sama antar <i>stakeholder</i> .
		<i>Capacity for Join Action</i> (Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat prosedur-prosedur untuk menjalankan bank sampah.</li> <li>2. Terdapat fasilitator untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan nasabah bank sampah.</li> <li>3. Terdapat sarana dan prasarana penunjang bank sampah.</li> <li>4. Terdapat program pengembangan pengetahuan pengurus bank sampah.</li> </ol>

Sumber: (Emerson et al., 2012)

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk mencari suatu fakta atau realita secara mendalam. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugrahani (2019) bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena apa yang terjadi di lapangan dengan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam (*natural setting*). Dalam Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif proses dan dinamika *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah anorganik berbasis masyarakat melalui bank sampah di Kelurahan Tegalpanggung dalam rangka pengurangan dan penanggulangan sampah.

### 1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta, Kelurahan Tegalpanggung, Forum Bank Sampah Kelurahan Tegalpanggung, Bank Sampah Unit yang berada Kelurahan Tegalpanggung, dan pengepulan sampah. Adapun justifikasi pemilihan lokasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Justifikasi Lokasi Penelitian

No	Nama Lokasi	Justifikasi Pemilihan Lokasi
----	-------------	------------------------------

1.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta	Instansi yang berwenang menangani permasalahan sampah dan menerbitkan kebijakan terkait pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.
2.	Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta	Organisasi yang membantu DLH Kota Yogyakarta mewujudkan sinergitas antar bank sampah sekaligus menjadi sarana berbagi informasi terkait pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
3.	Kelurahan Tegalpanggung	Fasilitator kelurahan (faskel) membantu mensosialisasikan dan mengawasi jalannya bank sampah.
4.	Forum Bank Sampah Kelurahan Tegalpanggung	Wadah komunikasi bank sampah tingkat kelurahan atau tingkat paling bawah yang beranggotakan bank sampah setiap RW.
5.	Bank Sampah Unit di Kelurahan Tegalpanggung	Komunitas masyarakat yang menjalankan program bank sampah.

6.	Pengepul sampah	Pihak swasta yang bekerjasama dengan unit bank sampah dalam mengelola sampah anorganik.
----	-----------------	---

### 1.9.3 Jenis Data

#### a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara dengan cara menggali sumber asli melalui informan dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber dari data penelitian ini didapatkan dari hasil observasi pada bank sampah di Kelurahan Tegalpanggung dan wawancara yang ditujukan pada sampel terpilih yaitu Ketua Tim Kerja Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta sebagai koordinator dan teknis terkait penanganan dan pengurangan sampah. Selanjutnya yaitu Ketua Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta sebagai pembina dan teknis terkait pelaksanaan program bank sampah di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Fasilitator kelurahan sebagai pengawas bank sampah di Kelurahan Tegalpanggung. Kemudian Ketua Forum Bank Sampah Kelurahan Tegalpanggung menjadi sumber pada penelitian ini sebagai koordinator bank sampah unit. Ketua bank sampah unit yang berada di wilayah Kelurahan

Tegalpanggung sebagai perwakilan masyarakat yang menjalankan program bank sampah, serta pengepul sampah sebagai pihak swasta yang bekerjasama dalam mengelola sampah anorganik.

Tabel 4. Data Primer

No	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup	Wawancara
2.	Ketua Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta	Wawancara
3.	Fasilitator Kelurahan Tegalpanggung	Wawancara
4.	Ketua Forum Bank Sampah Kelurahan Tegalpanggung	Wawancara
5.	Ketua unit bank sampah di wilayah Kelurahan Tegalpanggung	Wawancara
6.	Pengepul sampah	Wawancara

## **b) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diambil melalui perantara atau secara tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk studi pustaka, laporan dan dokumentasi pelaksanaan program bank sampah di Kelurahan Tegalpanggung. Data tersebut diambil pada jangka waktu tahun 2022-2023.

### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **a) Wawancara**

Wawancara merupakan proses pengambilan data dengan cara percakapan *face to face*, dimana satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya (Fadhallah, 2021). Wawancara akan dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dengan spesifikasi Ketua Tim Kerja PSDLH yang kaitannya sebagai koordinator dan teknis pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Selanjutnya akan dilakukan wawancara kepada Ketua Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta kaitannya dengan teknis pelaksanaan program bank sampah. Kemudian akan dilakukan wawancara kepada Fasilitator kelurahan (faskel) yang kaitannya pengawas bank



sampah, Ketua Forum Bank Sampah Kelurahan Tegalpanggung yang kaitannya koordinator komunikasi setiap unit bank sampah di Kelurahan Tegalpanggung, Ketua unit bank sampah sebagai pelaksana program bank sampah, serta pengepul sampah yang kaitannya dengan pihak swasta yang bekerjasama dalam mengelola sampah anorganik.

Tabel 5. Data Narasumber Wawancara

No	Instansi	Jabatan	Nama Narasumber	Data yang diperoleh
1.	Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta	Ketua Tim Kerja PSDLH	Nada Mutiara Putri, S.T.	Informasi mengenai program-program pengurangan dan penanggulangan sampah.
		Wakil II Forum Bank Sampah Kota	Sri Martini	Informasi mengenai mekanisme sinergitas pelaksanaan bank sampah.

		Yogyakarta		
		a		
3.	Kantor Kelurahan Tegalpanggung	Fasilitator Kelurahan	Sri	Informasi terkait sosialisasi, monitoring dan evaluasi bank sampah di Kelurahan Tegalpanggung.
		Ketua Forum Bank Sampah Kelurahan Tegalpanggung	Elly Citra	Informasi mengenai peran Forum Bank Sampah Kelurahan Tegalpanggung sekaligus mengetahui pelaksanaan bank sampah unit yang ada di Kelurahan

				Tegalpanggu ng.
4.	Unit Bank Sampah	Ketua Unit Bank Sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uswatun</li> <li>2. Tutuk Fadilah</li> <li>3. Sulis</li> <li>4. Murdianin gsih</li> <li>5. Elly Citra</li> <li>6. Ari Riyanti</li> <li>7. Ambar</li> <li>8. Atik</li> </ol>	Informasi terkait pelaksanaan bank sampah serta <i>output</i> yang dihasilkan setelah adanya bank sampah di setiap RW.
5.	Pengepul Sampah	Pengepul sampah	Arman	Informasi terkait peluang, kendala dan tantangan menjadi pihak swasta yang bekerjasama dengan unit bank sampah.

b) Observasi

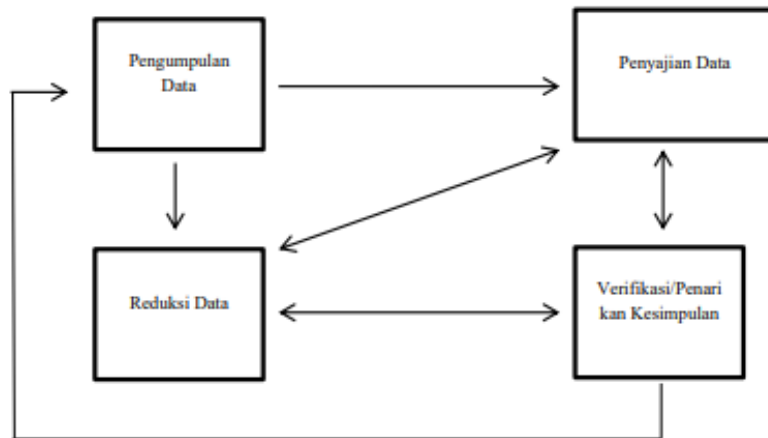
Denzin & Lincoln (2017) menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan ilmiah empiris yang berdasarkan fakta-fakta maupun teks. Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada unit bank sampah di Kelurahan Tegalpanggung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme kinerja sekaligus kolaborasi yang terjalin antar bank sampah di Kelurahan Tegalpanggung.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan proses pencarian data mengenai suatu hal yang dapat berupa buku, catatan, arsip, artikel, ataupun berita (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini dibutuhkan berbagai dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dan Forum Bank Sampah Kelurahan Tegalpanggung. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain dokumen *masterplan* pengelolaan persampahan, dokumen bank sampah unit Kelurahan Tegalpanggung, dan laporan manajemen unit bank sampah di setiap RW di Kelurahan Tegalpanggung.

### 1.9.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan untuk memverifikasi data yang telah terkumpul melalui triangulasi data dengan 4 tahapan sebagai berikut (Miles & Huberman, 1992):



Gambar 6. Teknik Analisis Data

Sumber: Miles & Huberman (1992)

#### 1. Pengumpulan data

Tahap pengumpulan data ini merupakan proses meyatukan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi oleh peneliti di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta, Forum Bank Sampah Kelurahan Tegalpanggung, Bank Sampah Unit yang berada di Kelurahan Tegalpanggung, dan pengepul sampah.

#### 2. Reduksi data

Pada tahap ini merupakan tahap memilah dan memilih data yang dikira penting atau dengan kata lain mengorganisasi data

sedemikian rupa sehingga dapat diambil menjadi kesimpulan akhir. Pada proses reduksi data akan menggunakan NVIVO 12 Plus untuk memproses data sehingga dihasilkan analisis dan visualisasi data berupa gambar, grafik, atau tabel.

### 3. Penyajian data

Pada tahap ini data-data yang telah diolah akan disajikan berupa deskripsi atau penjabaran dan korelasi dengan tema sehingga memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi.

### 4. Tahap Verifikasi

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan terkait penjelasan-penjelasan dan alur sebab-akibat yang telah disajikan. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang valid dan menemukan hal baru yang belum pernah diteliti terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah anorganik melalui bank sampah di Kelurahan Tegalpanggung.